

**PENGARUH PERKEMBANGAN PERMUKIMAN SWADAYA
TERHADAP UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA TAMANSARI**
**Effect of Settlement Development Organization
Heritage Preservation Efforts Against Tamansari Castle**

¹Indro Sulistyanto, ²Eny Krisnawati, ³Danarti Karsono

^{1,2,3}Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan

Jl. M. Walanda Maramis No. 31, Cengklik, Surakarta

E-mail : ¹indrosulistyanto@yahoo.co.id, ²enykrisnawati4@yahoo.com, ³danartikarsono@yahoo.com

Diterima : 04 September 2014; Disetujui : 19 Januari 2015

Abstrak

Situs Cagar Budaya Tamansari memiliki nilai sejarah yang tinggi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Kraton Yogyakarta, yang pada awalnya berperan sebagai tempat Raja dan Kerabat Kraton beristirahat dan mesanggrah (menenangkan pikiran). Permasalahan yang terjadi adalah sisa-sisa artefak yang ada bercampur-baur dengan perkembangan perumahan dan kegiatan usaha di sekitarnya, menurun eksistensinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terhadap tingkat kerusakan yang terjadi pada artefak berupa elemen-elemen benda cagar budaya yang ada. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pisau analisis berupa kerangka gagasan pelestarian situs Cagar Budaya Tamansari yang kita pakai untuk menganalisis dan mensintesis tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh perkembangan permukiman swadaya yang tidak terkendali, dengan melakukan analisis terhadap variabel situs Cagar Budaya Tamansari terhadap variabel perkembangan permukiman swadaya di sekitarnya. Beberapa elemen-elemen peninggalan berupa artefak, masih dapat ditengarai dalam bentuk puing-puing yang tidak lagi utuh, keberadaannya masih sangat menunjang untuk memberikan gambaran situasi Kawasan Cagar Budaya Tamansari pada keadaan aslinya. Hasil akhir dari kegiatan penelitian menunjukkan adanya korelasi antara pergeseran perilaku masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan permukiman swadaya terhadap upaya konservasi bangunan cagar budaya.

Kata Kunci : Permukiman swadaya, perilaku masyarakat, konservasi, cagar budaya, Tamansari

Abstract

World Heritage Castle has a high historical value, as an integral part of the existence of Kraton, which initially serves as a king and Relatives Kraton rest and mesanggrah (calming the mind). The problem that occurs is the remnants of existing artifacts mingled with residential development and business activities in the vicinity, decreasing its existence. The purpose of this study was to obtain a picture of the level of damage to the artifacts in the form of elements of cultural heritage objects. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis using a knife in the form of a framework heritage site preservation idea Castle that we use to analyze and synthesize the level of damage caused by the development of self uncontrolled settlements, with an analysis of the variables of the Castle Heritage sites variable non-residential development in the vicinity. Some elements of heritage artifacts, still can be observed in the form of debris that is no longer intact, its presence is still very supportive to give a picture of the situation Cultural Reserve Castle to its original state. The final results of the research activities showed a correlation between the shift in the behavior of people in the development and construction of non-residential to conservation of heritage buildings.

Keyword : Self-supporting settlement, behavior of society, conservation, cultural pledge, Tamansari

PENDAHULUAN

Berbagai upaya penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang bermukim (dan bergiat) di sekitar Cagar Budaya Tamansari-Kraton Yogyakarta, merupakan bagian utama dalam menemu-tunjukkan adanya korelasi antara perilaku masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan permukiman, terhadap berbagai upaya konservasi yang telah, sedang dan akan

dilaksanakan pada bangunan Cagar Budaya Tamansari-Kraton Yogyakarta. Pemahaman atas pergeseran perilaku ini akan sangat menentukan kesatuan proses yang nantinya perlu ditempuh dalam kesatuan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Tamansari-Kraton Yogyakarta (Soekiman, Djoko, Dkk. 1992/1993).

Dalam konteks bangunan Cagar Budaya Tamansari, berbagai kerusakan yang terjadi baik karena alam

maupun ulah manusia, seolah memberi ruang yang lebih leluasa terjadinya intervensi bangunan dan lingkungan permukiman swadaya terhadap berbagai artefak yang mengalami kerusakan/keruntuhan. Apabila pada awalnya permukiman yang tumbuh dan berkembang merupakan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi penjaga bagi kelestarian artefak budaya Tamansari, semakin luntur oleh kebutuhan ruang untuk keperluan permukiman. Tanpa disadari ternyata telah terjadi pengikisan perilaku masyarakat yang bermukim saat ini (dan kemungkinan semakin kompleks di masa mendatang), dalam memandang keberadaan Cagar Budaya Tamansari. Gempa 27 Mei 2006 yang meruntuhkan berbagai bagian artefak budaya Tamansari, seolah mendorong dan memberi ruang gerak yang cukup leluasa bagi tumbuh dan berkembangnya ruang-ruang permukiman yang baru. Kondisi tersebut terlihat dari berbagai situs cagar budaya yang semakin terdesak untuk kepentingan permukiman dengan kegiatan usaha kerajinan batik, dan jenis kerajinan tangan berupa aksesoris ruangan terbuat dari batik sebagai cinderamata bagi wisatawan, merupakan salah satu usaha masyarakat yang terjadi pada beberapa bagian utama kawasan, seperti terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 4. Kerusakan juga terlihat pada Gambar 1 yang menunjukkan keberadaan *Gapura* (Gerbang Masuk) menuju *Pulau Cemethi*, semakin tertutup oleh permukiman dan kegiatan usaha, dan sebagian besar bangunan *Pulau Cemethi* yang rusak dan mulai terdesak untuk permukiman, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



Gambar 1 *Gapura* (Gerbang Masuk) Menuju *Pulau Cemethi*, Semakin Tertutup Oleh Permukiman Dan Kegiatan Usaha



Gambar 2 Kerajinan Batik Sebagai Salah Satu Usaha Masyarakat Sebagai Cinderamata Wisatawan



Gambar 3 Bagian Bangunan *Pulau Cemethi* Yang Rusak (Sengaja Dirusak) Dan Mulai Terdesak Untuk Permukiman



Gambar 4 Jenis Kerajinan Tangan yang Lain Berbagai Cinderamata Aksesoris Ruangan Terbuat dari Batik

Pokok permasalahan yang melandasi penelitian ini adalah menurunnya kepedulian masyarakat di sekitarnya dalam melestarikan Cagar Budaya Tamansari Kraton Yogyakarta. Hipotesisnya adalah, degradasi kepedulian masyarakat telah menurunkan kualitas artefak Cagar Budaya Tamansari Kraton Yogyakarta. Adapun kegiatan penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran tentang degradasi bangunan cagar budaya.

Penelitian ini juga dikait-hubungkan dengan kejadian gempa bumi 27 Mei 2006, yang memberikan dampak pada beberapa kerusakan artefak, sehingga semakin memicu untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan kegiatan permukiman swadaya oleh masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan penelitian ini disusun dengan melakukan korelasi antara beberapa parameter perkembangan permukiman di sekitar situs cagar budaya, terdiri atas : (1) kerangka umum pengembangan dan pembangunan permukiman, (2) kerangka pengembangan dan pembangunan permukiman di Kawasan Kraton, dan (3) pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya yang secara utuh berkaitan dengan berbagai tatanan tradisional, dan nilai-nilai kesejarahan yang berkembang di sekitar Cagar Budaya Tamansari.

Pada dasarnya pembangunan permukiman merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah dan masyarakat, dalam bentuk tugas dan peran masing-masing secara seimbang. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang lebih dominan dalam memfasilitasi dan memberikan mediasi, sedangkan masyarakat diharapkan dapat lebih bertanggung jawab secara penuh dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, terutama secara fisik.

Prosedur penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar cagar budaya (apalagi yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang) disusun agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perkembangan permukiman, dapat lebih memberi arti dengan menyentuh pada revitalisasi bangunan dan lingkungan permukiman yang memiliki karakteristik spesifik baik dari tradisional, keeratannya dengan seni budaya, maupun kedekatannya dengan nilai-nilai kesejarahan dapat berjalan seiring dan serasi dengan berbagai upaya konservasi terhadap cagar budaya yang ada di sekitarnya dalam suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta, 1999).

Kerangka kegiatan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar cagar budaya, dicapai melalui indikator kinerja : *output*, *outcome*, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kepentingan antara keduanya. Kondisi yang selama ini terjadi, menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan permukiman swadaya tidak dapat diimbangi dengan upaya konservasi yang dilakukan terhadap cagar budaya (Fakultas Teknik-UGM 1994/1995). Menurunnya kondisi cagar budaya, seolah menjadi peluang bagi permukiman swadaya untuk semakin mendesak benda cagar budaya yang ada di sekitarnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan kajian terhadap kondisi kontekstual atas keberadaan bangunan Cagar Budaya Tamansari, yang secara perlahan namun pasti dalam periodisasi tertentu mengalami berbagai kerusakan dan kemunduran fisik baik yang diakibatkan faktor usia, faktor alam, dan terutama intervensi kegiatan pembangunan permukiman swadaya yang ada di sekitarnya.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan *super imposed* perkembangan permukiman swadaya dan eksistensi artefak yang berada dalam kawasan Cagar Budaya Tamansari-Kraton Yogyakarta, dengan hipotesis, bahwa semakin menurunnya kualitas artefak cagar budaya karena terdesak oleh permukiman swadaya, mengindikasikan telah

terjadi degradasi kepedulian masyarakat sekitar terhadap pelestarian Cagar Budaya Tamansari-Kraton Yogyakarta.

Dalam melakukan analisis, eksistensi Cagar Budaya Tamansari-Kraton sangat dipengaruhi oleh perkembangan permukiman swadaya yang ada di sekitar artefak cagar budaya. Menurunnya kepedulian masyarakat yang bermukim di sekitar Cagar Budaya Tamansari-Kraton dalam mendukung upaya pelestarian, dilakukan dengan melakukan *super imposed* terhadap keberadaan Cagar Budaya Tamansari-Kraton terhadap permukiman swadaya di sekitarnya. Persentase tingkat kerusakan artefak, akan menunjukkan penurunnya tingkat kepedulian masyarakat sekitar terhadap setiap upaya pelestarian cagar budaya, yang menjadi salah satu aset budaya terdekat dan memiliki nilai filosofi yang tinggi bagi keberadaan Kraton Yogyakarta Hadiningrat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan yang dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian, diperoleh gambaran atas Kawasan Cagar Budaya Tamansari, yang memperlihatkan semakin 'tenggelamnya' berbagai artefak budaya di tengah lautan permukiman warga. Hampir sulit untuk dapat ditengarai lagi rentetan bangunan sebagai artefak budaya yang menghubungkan antara situs yang satu dengan situs yang lain, sebagai kerangka utuh keberadaan Cagar Budaya Tamansari.

Hasil analisis dengan melakukan *super imposed* terhadap cagar budaya dan permukiman swadaya menunjukkan, bahwa dalam skala kawasan, 64 % (enam puluh empat persen) bagian kawasan telah berubah menjadi permukiman swadaya, semenjak Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memerintah Kraton Yogyakarta sejak 8 Maret 1940 sampai dengan 2 Oktober 1988, mencetuskan kebijakan : Tahta untuk Rakyat. Kondisi ini lebih diperparah dengan beberapa bagian inti Cagar Budaya Tamansari-Kraton telah rusak (sengaja dirusak) untuk kepentingan bermukim dan berusaha, mencapai 47 % (empat puluh tujuh persen). Apabila persentase tersebut digunakan sebagai tingkat kepedulian masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian Cagar Budaya Tamansari-Kraton Yogyakarta, maka tingkat kepedulian bagi pelestarian kawasan cagar budaya sebesar 36 % (tiga puluh enam persen), sedang dalam skala inti kawasan cagar budaya sebesar 53 % (lima puluh tiga persen). Pada saat penelitian ini dilakukan (2013), kondisi yang jelas terlihat kerusakan bangunan *Pulau Cemethi*, sebagai salah satu bagian inti cagar budaya yang sudah mulai dirambah untuk kegiatan permukiman. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan tingkat

kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya Tamansari, tidak hanya pada persentase perkembangan luas permukiman swadaya saja, namun juga pada kepedulian untuk melestarikan pada kawasan intinya yang semakin terdesak untuk kegiatan permukiman.

Belum adanya perlindungan secara hukum terhadap Cagar Budaya Tamansari, ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi secara terus menerus dan tidak terkendali sampai kepada kawasan intinya (Fransiska Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, 2012).

Berdasarkan hasil kajian atas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman di Kawasan Kraton Yogyakarta (termasuk di dalamnya Kawasan Cagar Budaya Tamansari sebagai bagian dari Kawasan Kraton Yogyakarta), diperoleh gambaran tentang maksud pembangunan dan pengembangan permukiman, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya keseluruhan kebutuhan akan pengaturan dan mekanisme pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari, sejak perencanaan, implementasi, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian, pengawasan dan pengendalian hasil pembangunan yang berkelanjutan
- b. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari diupayakan dengan mengakomodir aspirasi dan kepentingan *stakeholders*, termasuk terbukanya peluang masyarakat untuk berperan serta dalam keseluruhan proses penyelenggaraan permukiman, tanpa meninggalkan eksistensi kawasan sebagai cagar budaya yang harus dilindungi dari berbagai kerusakan yang kemungkinan terjadi
- c. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari merupakan bagian dari Rencana Konservasi Cagar Budaya Tamansari yang terlanjutkan
- d. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari di harapkan melembaga pada institusi terkait yang menangani permasalahan permukiman, dengan tetap berpedoman pada peraturan penataan bangunan dan lingkungan dari lembaga yang kompeten di dalam Kraton Yogyakarta, dalam hal ini adalah *Wahana Sarta Kriya*
- e. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari merupakan komitmen pemerintah daerah (Kota Yogyakarta, dan Provinsi DIY), dan Kraton Yogyakarta, untuk melaksanakan pembangunan perumahan permukiman yang melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat

- f. Pada dasarnya pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari harus mengacu pada kerangka penataan ruang wilayah, maupun penataan ruang yang secara khusus berlaku di Kawasan Kraton Yogyakarta
- g. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari diharapkan dapat berlangsung secara tertib terencana dan terorganisasi dengan baik, berdaya dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Cagar Budaya.

Dari kajian atas kebijakan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Kraton Yogyakarta, diperoleh gambaran tentang tujuan pembangunan dan pengembangan permukiman, sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari dilandasi pada upaya pembangunan yang aspiratif dan akomodatif, dan dapat menjadi acuan bersama oleh seluruh pelaku dan penyelenggara pembangunan, dengan tetap bersendikan eksistensi Cagar Budaya Tamansari.
- b. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari direncanakan dalam suatu kerangka pembangunan yang tertib dan terorganisasi serta dapat memberikan peluang bagi partisipasi aktif masyarakat untuk berperan dalam keseluruhan prosesnya, dengan tetap menghormati keberadaan Cagar Budaya Tamansari.
- c. Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari diupayakan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan akan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat memperoleh legitimasi yang jelas (baik oleh Kraton Yogyakarta, maupun oleh peraturan/perundangan yang berlaku).

Faktor manusia, melalui perkembangan permukiman swadaya memberi andil yang sangat besar bagi terjadi kerusakan situs cagar budaya, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 5, menunjukkan keadaan Pulau Cemethi yang mengalami kerusakan lebih awal dibandingkan akibat Gempa 27 Mei 2006, baik karena faktor usia dan alam. Sedangkan pada Gambar 6 secara jelas menunjukkan kerusakan Pulau Cemethi karena faktor manusia, dengan adanya intervensi permukiman swadaya.



Gambar 5 Kerusakan Bangunan Pulau Cemethi Karena Faktor Usia Dan Alam (Terutama Gempa 27 Mei 2006)



Gambar 6 Kerusakan Pulau Cemethi Karena Faktor Manusia, Dengan Adanya Intervensi Permukiman Swadaya

Pembangunan dan pengembangan permukiman pada Kawasan Cagar Budaya Tamansari diupayakan nantinya dapat terekam sebagai informasi pembangunan permukiman yang tersusun secara sistematis dalam bentuk *data base*, sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah vertikal dan penyusunan rencana program kegiatan oleh berbagai pelaku pembangunan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan perumahan swadaya, diperlukan pemahaman secara utuh terhadap kebijaksanaan wilayah dan sektoral, agar diperoleh kejelasan tentang arahan dan bentuk upaya pembangunan dan pengembangan permukiman yang spesifik berkembang (baik dari sisi tradisi, kesejarahan, budaya) di Kawasan Cagar Budaya Tamansari.

Intervensi yang lebih tinggi terjadi di sekitar Pulau Kenanga, yang sebagaimana terlihat pada Gambar 7 sampai dengan Gambar 12, yang menunjukkan perkembangan permukiman swadaya yang semakin dalam mendesak keberadaan situs cagar budaya. Kondisi ini mengindikasikan eksistensi keberadaannya sebagai situs cagar budaya semakin tenggelam oleh tingginya tingkat perkembangan permukiman swadaya di sekitarnya. Demikian pula yang terjadi pada gerbang penghubung antara Pulau Cemethi dan Pulau Kenanga.



Gambar 7 Kompleks Bangunan Pulau Kenanga, Telah Mengalami Pemugaran, Semakin Tertutup Oleh Permukiman Swadaya



Gambar 8 Intervensi Permukiman Swadaya, Hampir Menutup Gerbang Masuk Ke Pulau Kenanga



Gambar 9 Pulau Kenanga, Semakin Rusak Dan Terdesak Permukiman Swadaya (Terlihat Bangunan Rumah Baru)



Gambar 10 Wajah Pulau Kenanga Hampir Tidak Terlihat, Tertutup Permukiman Dan Aktivitas Lain



Gambar 11 Gerbang Penghubung Pulau Cemethi Dengan Pulau Kenanga Menjelang Runtuh (Terlihat Rumah Baru Dalam Proses Pembangunan)



Gambar 12 Gerbang Menuju Lorong Ke Pulau Kenanga Baru Mengalami Pemugaran Tetapi Sudah Mengalami Kerusakan

Kondisi serupa juga terjadi pada bagian situs cagar budaya, Lorong menuju Sumur Gemuling, walaupun baru saja mengalami pemugaran, namun sudah mulai terdesak oleh permukiman swadaya, sebagai mana terlihat pada Gambar 13 dan Gambar 14.



Gambar 13 Gapura Menuju Lorong Ke Sumur Gemuling (Baru Mengalami Pemugaran)



Gambar 14 Lorong Menuju Sumur Gemuling Dengan Bentuknya Yang Khas

Serangkaian proses yang dilalui dalam pengembangan dan pembangunan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, disusun berdasarkan pertimbangan potensi tradisi-budaya-kesejarahan yang harus dilestarikan secara terlanjutkan, sehingga diperoleh keserasian pembangunan antara permukiman dengan tatanan tradisi, seni budaya, dan nilai-nilai kesejarahan yang ada pada Cagar Budaya Tamansari yang memerlukan upaya konservasi menyeluruh.

Kekayaan Budaya Sebagai Potensi Penataan Kawasan Cagar Budaya Tamansari

Sebagai upaya dari pengembangan permukiman yang secara spesifik dalam bentuk penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, perlu diperlukan upaya pengembangan dalam bentuk pelestarian yang dinamis, sebagai bagian dari upaya melindungi berbagai potensi budaya tradisional dan nilai-nilai kesejarahan yang teridentifikasi melalui keberadaan bangunan dan lingkungan permukiman yang ada di sekitar Cagar Budaya Tamansari dari kemungkinan menurunnya otensitas, fungsi kultural, dan kemungkinan kepunahannya.

Keterlibatan masyarakat dengan tatanan kehidupan sosial-ekonomi-budaya, akan menjadi suatu alternatif bentuk pelestarian yang dinamis bagi penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari.

Tatanan tradisi, dan nilai-nilai kesejarahan yang nampak dari bangunan dan lingkungan permukiman, merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di Kawasan Cagar Budaya Tamansari yang perlu dilestarikan secara dinamis, agar dapat digunakan sebagai titik tolak penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari.

Gambar 15 dan Gambar 16, memperlihatkan bagian dalam Sumur Gemuling yang masih terjaga kelestariannya setelah melalui proses pemugaran.



Gambar 15 Bagian Dalam Sumur Gemuling



Gambar 16 Bagian Atas Sumur Gemuling, Terbuka Sebagai Penghawaan

Semenjak terbentuknya suatu lingkungan tradisional/bersejarah yang bersendikan pada tradisi, budaya, dan nilai-nilai kesejarahan yang ada di sekitar Cagar Budaya Tamansari sampai saat ini, telah menyimpan berbagai sisi tatanan kehidupan tradisional yang mampu berjalan seiring dengan berkembangnya tatanan kehidupan moderen (Sukirman, DH. 1995).

Upaya pengembangan dan pelestarian tatanan kehidupan yang dinamis, menjadi kekayaan tradisi, seni, dan budaya sebagai bagian dari rentetan sejarah keberadaan permukiman yang masih terjaga di sekitar Cagar Budaya Tamansari.

Kekayaan tradisi, seni, budaya, dan nilai-nilai kesejarahan dari permukiman spesifik yang berkembang di sekitar Cagar Budaya Tamansari, dapat dikelompokkan berdasarkan potensi yang berkembang secara dinamis, meliputi keberadaan :

- a. Benda cagar budaya
- b. Lokasi budaya dan lokasi wisata
- c. Potensi industri kerajinan
- d. Kawasan cagar budaya
- e. Potensi kesenian
- f. Potensi lembaga budaya
- g. Obyek dan daya tarik wisata
- h. Potensi pertunjukan dan event wisata
- i. Potensi prasarana budaya
- j. Potensi prasarana wisata
- k. Potensi pusat jajan dan makanan
- l. Potensi sentra kerajinan
- m. Potensi sentra makanan tradisional
- n. Potensi tempat rekreasi dan hiburan
- o. Potensi upacara adat

Nilai-nilai tradisi budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat di sekitar Cagar Budaya Tamansari, terlihat dari tetap terjaganya ke limabelas potensi tersebut sebagai warisan budaya yang berjalan secara dinamis. Dalam perkembangannya ke limabelas potensi tersebut berproses secara alamiah. Diperlukan kearifan dalam menjaga kelestarian kekayaan budaya Kawasan Cagar Budaya Tamansari agar menurunnya otensitas dan fungsi kulturalnya dapat dipertahankan, dari berbagai pengaruh

perkembangan yang berlangsung dengan pesat, baik dari sisi pengembangan dan pembangunan permukiman, maupun upaya konservasi Cagar Budaya Tamansari. Pada sisi lain secara alamiah telah terjadinya proses migrasi ide dan pemikiran, migrasi kultural, dan migrasi fisik, yang secara langsung akan memberi dampak pada kelestarian permukiman tradisional/ bersejarah yang ikut mengemban kekayaan tradisi, seni, budaya, dan pandangan terhadap nilai-nilai kesejarahan yang ada di Kawasan Cagar Budaya Tamansari.

Relevansi Penataan Kawasan Cagar Budaya Tamansari Sebagai Bagian dari Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya, Tradisi, Pendidikan, dan Pariwisata

Keberadaan seni budaya, nilai-nilai kesejarahan, dan tradisi yang berkembang secara khas di Kawasan Cagar Budaya Tamansari akan sangat relevan dengan misi penataan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, sehingga memungkinkan terciptanya berbagai peluang bagi pengembangan permukiman swadaya dengan tetap menghormati upaya-upaya konservasi Cagar Budaya Tamansari di sekitarnya. Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada konsep penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari untuk diimplementasikan, tidak hanya dengan mengangkat seni budaya, nilai-nilai kesejarahan, dan tradisi khas Kawasan Cagar Budaya Tamansari dalam bentuk bangunan dan lingkungan permukiman, melainkan juga menyangkut seluruh ruang, atmosfer, dan dinamika masyarakat yang membuat Kawasan Cagar Budaya Tamansari menjadi lebih hidup.

Perlu upaya menumbuhkan-kembangkan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi produktif, dan pendayagunaan sarana dan prasarana lingkungan sebagai satu kesatuan dari upaya pemberdayaan menyeluruh, yang akan menentukan dalam penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang bernafaskan tatanan tradisi, nilai-nilai budaya, dan kesejarahan yang merupakan 'ruh' di dalamnya. Tiga pilar yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pemberdayaan tersebut adalah apabila dapat menyentuh pada hakekat tata kehidupan masyarakat yang terdiri atas pangan, sandang, dan papan, yang saat ini terrefleksikan dalam tatanan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya yang tumbuh dan berkembang di sekitar artefak-artefak Cagar Budaya Tamansari yang memerlukan upaya konservasi dengan dilindungi oleh peraturan dan perundangan yang lebih ketat. Kegiatan penelitian tentang Korelasi antara Pergeseran Perilaku Masyarakat dalam

Pengembangan dan Pembangunan Permukiman Swadaya terhadap Upaya Konservasi Bangunan Cagar Budaya, Studi Kasus : Kawasan Cagar Budaya Tamansari Kraton Yogyakarta ini diharapkan juga dapat memberi arah bagi upaya pendampingan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya yang bernafaskan tatanan tradisi, nilai-nilai budaya, dan kesejarahan yang tumbuh dan berkembang di dalamnya dari waktu-ke waktu.

Tahap-tahap penataan bangunan dan lingkungan permukiman dan konservasi cagar budaya, seyogyanya ditempuh melalui penyiapan masyarakat yang direncanakan sebagai bagian dari upaya sosialisasi atas visi, misi, dan program-program pendampingan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di Kawasan Cagar Budaya Tamansari yang terdiri atas pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi produktif, dan pendayagunaan sarana dan prasarana lingkungan sebagai satu kesatuan dari upaya penataan kawasan cagar budaya dan sepenuhnya tumbuh dari aspirasi masyarakat (*bottom-up planning*). Dalam konteks ini, maka kedudukan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari disusun berdasarkan atas rencana tindak pada tingkat komunitas – *community action plan (CAP)* yang disepakati dalam suatu forum yang disebut sebagai sosialisasi, agar aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Proses ini diharapkan dapat menjadi kesepahaman antar seluruh *stakeholders*, yang pada gilirannya diharapkan dapat digunakan untuk melakukan negosiasi dan menjangkau sumberdaya pembangunan, serta memobilisasi potensi yang ada secara bertahap dan berkesinambungan.

Beberapa tahapan yang semestinya harus ditempuh dalam penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari sejak dari penyiapan masyarakat, survei kampung sendiri, penyusunan rencana teknis, dan penataan kawasan melalui CAP, selama ini belum dilakukan, sehingga kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan semakin tingginya intervensi permukiman swadaya terhadap artefak-artefak cagar budaya yang semakin menurun karena kerusakan yang terjadi. Serangkaian proses penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Tamansari yang tersusun atas : penyiapan masyarakat, survei kampung sendiri, penyusunan rencana teknis, dan penataan kawasan melalui CAP adalah sebagai upaya untuk mempercepat terciptanya tata bangunan dan lingkungan permukiman swadaya yang memenuhi standar kelayakan untuk dihuni,

sehat, tertata, terencana dengan baik, dan berkelanjutan yang menyatu dengan upaya konservasi Cagar Budaya Tamansari. Melalui proses penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Tamansari, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh dari kondisi dan potensi yang ada, sebagai berikut :

- a. Menemu-kenali, dan selanjutnya menggali potensi berbagai permasalahan yang ada berkaitan dengan bangunan dan lingkungan permukiman sejalan dengan tradisi, budaya, dan nilai-nilai kesejarahan yang tumbuh dan berkembang di dalamnya
- b. Tersusunnya CAP yang berkaitan dengan upaya penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari yang benar-benar merupakan aspirasi dari masyarakat yang bergiat pada komunitas yang disepakati, agar taraf kehidupannya dapat meningkat (terkait dengan pemberdayaan manusia, pemberdayaan kegiatan usaha, dan pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungannya), dengan tetap menghormati keberadaan Cagar Budaya Tamansari yang harus dilestarikan dan dilindungi
- c. Terciptanya pedoman yang jelas bagi pelaksana penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari sampai di tingkat komunitas paling bawah dalam bentuk CAP yang tersusun dalam rentang waktu dan tahapan yang terencana dan terlanjutkan
- d. Diperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat swadaya masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari

Fenomena Umum Perilaku Masyarakat Di Sekitar Cagar Budaya Tamansari

Berkembangnya kebutuhan kehidupan yang demokratis, telah berpengaruh pada bergesernya peran para pelaku pembangunan, yang sebelumnya bertumpu pada peran pemerintah sebagai *developer* pembangunan, menjadi *enabler* yang benar-benar harus konsekuen dan konsisten mendudukkan masing-masing pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam kegiatan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, pada peran dan fungsi yang semestinya. Selanjutnya berkembang paradigma penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, dengan memberikan peran secara penuh kepada para *stakeholders* yang bergiat di Kawasan Cagar Budaya Tamansari tidak hanya dalam proses, namun terutama di dalam spirit

pembangunan yang terdiri dari unsur masyarakat dan swasta (Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Propinsi DIY, Proyek Perintis Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota. 1986). Kondisi ini sering disalahartikan dengan demikian mudahnya meninggalkan tatanan tradisi-budaya-sejarah keberadaan Tamansari, sebagai bagian seutuhnya dari Kraton Yogyakarta. Kondisi ditunjukkan dengan semakin menurunnya kepedulian masyarakat terhadap tradisi-budaya-sejarah Tamansari, dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, dan bergesernya masyarakat yang bermukim di sekitarnya yang tidak memahami arti penting keberadaan Cagar Budaya Tamansari bagi tatanan kehidupan menyeluruh.

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, terjadi pergeseran peran pemerintah dalam proses pembangunan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, menjadi fasilitator yang menjembatani para *stakeholders* untuk memperoleh kesepakatan dan manfaat optimal dari setiap proses pembangunan melalui program penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari. Pemahaman ini menjadi salah satu tolok ukur dalam mengimplementasikan arah dan bentuk penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, karena apa yang terbentuk sekarang ini tidak lepas dari kondisi masyarakat (SDM), ekonomi produktif, serta sarana dan prasarana lingkungan untuk melandasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Sehingga proses pembangunan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari tidak lagi semata-mata sebagai proses teknis planologis, namun juga proses sosial-budaya, politik, dan ekonomi, yang terangkum dalam kegiatan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, dengan spesifikasi tradisi-budaya-kesejarahan yang dimilikinya.

Dalam melakukan kajian terhadap pergeseran masyarakat, lokasi permukiman swadaya yang ada di sekitar Cagar Budaya Tamansari yang menjadi objek penelitian ini, dari hasil pengamatan terlihat suatu kondisi masyarakat yang bermukim dan bergiat di dalam Kawasan Cagar Budaya Tamansari, belum sepenuhnya memperoleh fasilitasi yang baik. Pada sisi lain belum ada kegiatan terstruktur berupa sosialisasi dan arahan sebagai bagian dari upaya penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya yang terpadu dan selaras dengan upaya konservasi Cagar Budaya Tamansari.

Penataan bangunan dan lingkungan yang berlangsung di Kawasan Tamansari, tidak lepas dari berkembangnya paradigma (pandangan) pola pembangunan serta berkembangnya kebutuhan kehidupan yang demokratis, telah berpengaruh pada bergesernya peran para pelaku pembangunan di Kawasan Cagar Budaya Tamansari, yang sebelumnya bertumpu pada peran pemerintah sebagai *developer* pembangunan, menjadi *enabler* yang benar-benar harus konsekuen dan konsisten mendudukkan masing-masing *stakeholders* pada peran dan fungsi yang semesti bagi seluruh *stakeholder* yang kompeten terhadap upaya-upaya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Tamansari. Selanjutnya berkembang paradigma pola penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Tamansari dengan memberikan peran secara penuh kepada para *stakeholders* yang bergiat masyarakat di sekitar Cagar Budaya Tamansari tidak hanya dalam proses, namun terutama di dalam spirit pembangunan yang terdiri dari unsur masyarakat dan swasta. Kondisi ini mendorong kemungkinan terciptanya peran masyarakat dan swasta yang terlalu besar, apalagi mereka berhadapan langsung dengan lingkungannya setiap waktu. Kondisi ini dapat berkembang menjadi seolah Cagar Budaya Tamansari dapat dikelola sepenuhnya oleh masyarakat sekitar. Sehingga 'pemeriksaan' terhadap setiap asset budaya, baik yang berupa situs maupun benda Cagar Budaya Tamansari, demikian mudah untuk diubah, digeser, dan dimusnahkan, oleh kepentingan kegiatan bermukim dan berusaha dari masyarakat di sekitar Cagar Budaya Tamansari.

Sebagai suatu pesanggrahan, keberadaan Cagar Budaya Tamansari tidak dapat terpisahkan dengan Kraton Yogyakarta Hadiningrat, sebagai bentuk tipologi perkotaan yang berkembang pada zamannya (Adrisijanti, Inajati, 1989).

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, terjadi pergeseran peran pemerintah dalam proses pembangunan, menjadi fasilitator yang menjembatani para *stakeholders* untuk memperoleh kesepakatan dan manfaat optimal dari setiap proses pembangunan. Sehingga proses pembangunan yang terjadi di Kawasan Cagar Budaya Tamansari tidak lagi semata-mata sebagai proses teknis planologis, namun juga proses sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai bagian dari proses politik, maka kepentingan masyarakat yang bergiat di dalam suatu wilayah merupakan basis utama dalam perumusan rencana pembangunan. Namun dampak yang terjadi, politik

masyarakat menyebabkan demikian lemahnya posisi situs dan benda Cagar Budaya terhadap kepentingan masyarakat sekitarnya untuk bermukim dan berusaha.

Kondisi ini memberi arah bagi dikembangkannya mekanisme yang membuka peluang bagi partisipasi warga (masyarakat) dalam hal ini masyarakat yang bermukim dan bergiat di sekitar Bangunan Cagar Budaya Tamansari secara lebih luas dan langsung dalam penyusunan rencana, implementasi, dan pembangunan. Implikasi dari pendekatan tersebut menjadi bagian mendasar yang digunakan dalam menentukan bentuk dan arah pembangunan yang spesifik bagi kawasan di sekitar Bangunan Cagar Budaya Tamansari, baik melalui organisasi, kelompok, atau bahkan individu.

Berbagai keputusan yang tertuang dalam serangkaian proses pembangunan terutama sangat memungkinkan munculnya berbagai perbedaan di dalam implementasinya di tengah masyarakat yang secara langsung terkena kebijaksanaan tersebut. Kondisi ini juga terjadi dari beberapa kebijakan penataan Bangunan Cagar Budaya Tamansari. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan permukiman yang begitu cepat di sekitar bangunan cagar budaya memberi implikasi pada semakin terdesaknya bangunan cagar budaya yang bersangkutan. Pada beberapa permukiman di sekitar Bangunan Cagar Tamansari, masyarakat yang bermukim dan bergiat di dalamnya telah menghuni berpuluh tahun yang lalu secara magersari, dari sejak *hanggadhu*, sampai dengan *handarbeni*. Semuanya didasarkan atas *palilah Ngarsa Dalem Kanjeng Sultan*. Masalahnya memang yang terjadi telah berkembang dengan berbagai kondisi kegiatan bermukim dan berusaha dengan segala permasalahan dan persoalan yang sedemikian kompleks. Pemahaman terhadap nilai-nilai kesejarahan dan filosofi strategis yang ada pada kawasan Cagar Budaya Tamansari, perlu senantiasa dilakukan secara berkesinambungan akan menjadi salah satu upaya pelestarian seutuhnya (Dewi Anita; Shofi Fatihatun Sholihah, 2012).

Pada beberapa proses pembangunan, beberapa kebijakan yang direkomendasikan secara khusus pada persiapan penyusunan rencana dan analisa teknis pembangunan, tanpa pertimbangan pada kemungkinan implementasi dan manajemen terhadap kemungkinan terjadinya konflik, baik yang berwujud politik, hukum, dan khususnya sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kondisi ini nampak dari berbagai kebijakan yang ditetapkan sebelumnya yang disusun hanya berdasar teori, *pakem*, tanpa

sedikitpun memperhatikan kondisi faktual (khususnya sosial-budaya-bangkitan ekonomis) yang saat ini berkembang di sekitar Kawasan Cagar Budaya Tamansari (Indro Sulistyanto, 2001).

Berbagai konflik yang terjadi kemudian, lebih diakibatkan dari belum terlibatkannya secara komprehensif setiap unsur dalam proses pembangunan, dalam prosedur yang merupakan kesepakatan bersama, dengan melibatkan masyarakat dalam memberi kontribusi secara aktif pada setiap bagian dari keseluruhan proses pembangunan.

Sumber-sumber konflik yang berkembang di tengah masyarakat dalam proses pembangunan, tersusun atas 4 (empat) hal yang tumpang tindih satu terhadap yang lain, meliputi : (1) Struktur Sosial (yang mengatur alokasi sumberdaya pokok di dalam masyarakat), (2) Prosedur Pengambilan Keputusan (yang menetapkan peraturan-peraturan untuk pembuatan kebijakan), (3) Masalah Substantif (yang memfokuskan pada hasil keputusan individual), dan (4) Adanya Ketidakpastian (yang mengubah harapan dari hasil yang telah diperhitungkan di masa mendatang).

Tradisi pluralisme demokratis telah menciptakan kesempatan keterlibatan yang luas terhadap proses penyusunan kebijakan oleh segenap unsur yang berkembang di tengah masyarakat yang menaruh perhatian, dan karena adanya kepentingan-kepentingan khusus yang terorganisir. Kondisi ini nampak *kental* berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang bermukim dan bergiat di sekitar Kawasan Cagar Budaya Tamansari. Pada Pertemuan *Malem Setu Pahing-an* sebagai wadah komunikasi antar warga yang bermukim di sekitar Kawasan Cagar Budaya Tamansari kondisi tersebut nampak jelas dari demikian antusiasme masyarakat dalam memberi pertimbangan dan wawasan terhadap upaya-upaya yang menurut pertimbangan masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Budaya Tamansari dapat disusun sebagai suatu *Community Action Plan*, yang pada saatnya akan memberi kepastian, baik bagi masyarakat untuk bermukim dan bergiat, turut terlibat dalam upaya memelihara dan melestarikan bangunan cagar budaya, dan memberi keleluasaan yang terukur bagi setiap upaya pemugaran yang akan diberlakukan pada beberapa bagian bangunan cagar budaya di Tamansari.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis bisa disimpulkan, bahwa telah terjadi perusakan yang terus menerus dan mengkhawatirkan terhadap upaya pelestarian

terhadap Cagar Budaya Tamansari, baik dalam skala kawasan, maupun bagian intinya. Kondisi ini terjadi sebagai akibat menurunnya tingkat kepedulian masyarakat sekitar dalam mendukung eksistensi setiap artefak cagar budaya, yang ditunjukkan dengan perkembangan permukiman swadaya. yang mencapai tingkat kepedulian bagi pelestarian kawasan cagar budaya sebesar 36 % (tigapuluh enam persen), sedang dalam skala inti kawasan cagar budaya sebesar 53 % (limapuluh tiga persen). Itu artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dalam skala kawasan sangat rendah, sedang dalam kawasan inti, menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.

Sebagai bagian dari kegiatan penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari, diharapkan tidak terlepas dari asas penataan permukiman dan konservasi cagar budaya, sehingga dilakukan sosialisasi dan implementasi program dan kegiatan yang nantinya akan dilalui dalam proses penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari melalui : penyiapan masyarakat, survei kampung sendiri, penyusunan perencanaan teknis, serta penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari yang memerlukan pendampingan masyarakat dalam rangka pelaksanaan fisik bangunan dan lingkungan yang berkaitan erat dengan tradisi-budaya-kesejarahan yang ada di dalam Kawasan Cagar Budaya Tamansari.

Saran

Melalui proses penataan bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari yang terpadu, disarankan dapat meminimalisir terjadinya intervensi lingkungan permukiman terhadap artefak-artefak cagar budaya, melalui :

- a. Pelestarian secara fungsional :
 - Revitalisasi terhadap permukiman swadaya
 - Pengaturan sempadan permukiman dengan benda cagar budaya sebagai perwujudan pelestarian
 - Pengaturan zonifikasi kegiatan usaha sesuai dengan jalur wisata
 - Revitalisasi kawasan secara menyeluruh, dengan menyusun *master plan* Kawasan Tamansari
- b. Pelestarian secara operasional :
 - Mengakomodir aspirasi dan potensi lingkungan permukiman swadaya yang

terpadu dan selaras dengan upaya konservasi Cagar Budaya Tamansari

- Menyusun acuan bersama bagi setiap pelaku kegiatan yang bergiat pada setiap komunitas, untuk tertatanya bangunan dan lingkungan permukiman swadaya di sekitar Cagar Budaya Tamansari

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data, informasi, dan berdiskusi dalam keseluruhan proses penelitian.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada masyarakat di lingkungan kawasan Cagar Budaya Tamansari, yang memberi dukungan penuh dalam mendampingi keseluruhan proses sampai diselesaikannya penelitian.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada Redaksi Jurnal Permukiman, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum, atas koreksi dan dimuatnya artikel ini.

Terimakasih kepada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan Surakarta yang telah memberikan fasilitas dan dukungan untuk terselesaikannya kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, Inajati (n.d.). Tahun. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Penerbit Jendela, Yogyakarta.
- Dewi Anita; Shofi Fatihatun Sholihah. 2012. *Revitalisasi Nilai Sejarah dan Filosofi Kawasan Cagar Budaya Tamansari Melalui Pendekatan Geospasial Secara Periodik*. Indonesian Journal Scientific Database-LIPI, Jakarta.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DI Yogyakarta. 1999. *Peraturan Bangunan Khusus Kawasan Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Fakultas Teknik-UGM. 1994/1995. *Laporan Penelitian Bangunan-Bangunan di Kawasan Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Fransiska Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja. *Perlindungan Hukum Cagar Budaya terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta*. 2012. *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 2, Juni 2012. Universitas Janabadra, Yogyakarta.
- Soekiman, Djoko, Dkk. 1992/1993. *Tamansari*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta.

Sukirman, DH. 1995. *Mengenal Sekilas Bangunan Pesanggrahan Tamansari Yogyakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Yogyakarta.

Sulistyanto, Indro, Seminar Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kraton dan Tamansari, 2001. Makalah Dipresentasikan, Dinas Kebudayaan Provinsi DI. Yogyakarta.